

## Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau

Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Berau

[rahma.abyalia@gmail.com](mailto:rahma.abyalia@gmail.com)

### Abstrak

*Region Budget is an indicator of how well the region's performance is because it shows how a policy is planned for one fiscal year and the priorities it has. If the APBD is managed properly, then all regions get the dues, and compulsories can be utilized optimally for the benefit of the region and society. This study aims to analyze the magnitude of the growth rate of Sisa Lebih Perhitungan Anggaran and to identify and describe the factors that led to the occurrence of Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) during the last five years in the financial statements of the Berau district government. This study is a quantitative descriptive study with a population of reports on the realization of the Berau District Budget for the 2017-2021 Fiscal Year. The sample in this study is in the form of excess budget calculations from revenue and expenditure budget data in the budget realization report of the Berau Regency APBD. The type of data used is secondary data sourced from the Berau Regency APBD realization report for the 2017-2021 Fiscal Year. Other results show that there is dependence on external funds, and the lack of quality of absorption of local budgets, causing dependence on fund management.*

### Kata Kunci

*APBD, revenue, expenditure, SiLPA*

## I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Anita dkk., desentralisasi dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah diberikan kepercayaan dalam mengelola keuangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah (Anita, Mohammad, & Hamzah, 2014). Diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentunya memiliki hubungan yang berkaitan karena dengan adanya peralihan wewenang pemerintah pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk mengolah keuangan daerahnya (Rahayu, 2016), Pasal 84 menyebutkan dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 137 menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Menurut Sudarsana dalam Djuniar menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang

ditetapkan pemerintah (Djuniar & Zuraida, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, APBD juga menjadi sarana bagi pemangku kepentingan tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dari sisi pendapatan daerah, perkembangan APBD dapat dijadikan dasar perencanaan jangka pendek. Selisih lebih atau kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Terjadinya Surplus anggaran ketika anggaran pendapatan melebihi anggaran belanja. Sedangkan, Defisit anggaran terjadi ketika anggaran pendapatan kurang dari anggaran belanja. Dalam penyusunan APBD, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) semestinya sama dengan nol, yang artinya penerimaan pembiayaan harus mampu menutupi terjadinya defisit anggaran. Nilai positif untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berarti terdapat pembiayaan bersih setelah dikurangi defisit anggaran masih tersisa, artinya masih adanya dana anggaran dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Namun apabila, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) negatif maka pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi, untuk itu harus dicari jalan keluar misalnya dari sumber pembiayaan lain, seperti utang, menekan pembelanjaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga nilai dari SiLPA menjadi nol. Tingginya angka surplus dan juga defisit dalam suatu anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah. Anggaran merupakan alat yang efektif sebagai pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah mengoreksi kinerjanya melalui hasil akhir anggaran yang diperoleh pada akhir anggaran yang diperoleh pada akhir tahun. Untuk sebuah anggaran yang baik, SiLPA dan SiKPA menjadi dua hal yang sangat dihindari sebab dengan adanya SiLPA dalam satu tahun anggaran memberikan gambaran ketidak cermatan dalam penganggaran dan lemahnya efektifitas realisasi anggaran dalam pelaksanaan APBD serta rendahnya penyerapan belanja modal. Begitu pula jika terjadi SiKPA diartikan bahwa pemerintah kurang cermat dalam menggunakan anggaran yang ada sebab tidak bisa menyesuaikan dengan yang telah ditargetkan atau terdapat ketidak sempurnaan dalam perencanaan kegiatan sehingga mengakibatkan adanya dana-dana yang tidak terealisasikan. Kurangnya analisa terhadap SiLPA guna untuk memperbaiki kinerja keuangan suatu daerah sebagai pertanggungjawaban untuk mencapai target dengan kemungkinan bahwa kurangnya memperhatikan perubahan yang terjadi dalam komposisinya, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya dan tingkat pertumbuhan SiLPA dari tahun ke tahun perlu untuk di teliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menganalisa SiLPA pada APBD di masa yang akan datang.

Penelitian ini dilakukan pada APBD Pemerintah daerah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur di Indonesia dikarenakan besarnya tingkat pertumbuhan SiLPA pada APBD Pemerintah Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017- 2021) dan kemungkinan apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau guna memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang didapat, yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah mengenai penyerapan APBD yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau serta memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang

pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar tingkat pertumbuhan SiLPA pada APBD Pemerintah Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017- 2021)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau?

## II. LANDASAN TEORI

### A. 1. Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal, Jensen dan Meckling 1976 (Firmansyah, 2019) Pada dasarnya teori keagenan merupakan teori prinsipal yang memiliki kaitan dengan badan pemerintahan seperti BPKD, kaitannya terletak pada posisi BPKD sebagai institusi SKPD bagian pemerintahan daerah yang berfungsi mengelola keuangan dan asset daerah, sehingga harus di pertanggung jawabkan setiap rupiah yang dikelolanya. Keberhasilan pembangunan merupakan tujuan utama BPKD. Maka dari itu, keberadaan BPKD sangat penting dalam jajaran pemerintahan.

### 2. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif dalam memberikan informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat mengenai program-program yang direncanakan pemerintah. APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran.

### 3. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sebagaimana besar SiLPA digunakan untuk belanja modal yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. SiLPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang digunakan untuk menandai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. SiLPA dijadikan indikator efisiensi, karena SiLPA akan berbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampaun penerimaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Namun demikian, untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal juga harus diimbangi dengan pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kinerja dan penerapan anggaran yang maksimal. Dimana selain PAD yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja daerah, pertumbuhan SiLPA dapat juga digunakan untuk menilai kinerja anggaran yang tentunya berkesinambungan dengan fiskal daerah (Mahmudi, 2016). SiLPA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SiLPA} &= \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan} \\ \text{Neto} &= (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Belanja}) + \\ &(\text{Realisasi Penerimaan Pembiayaan} - \text{Realisasi Pengeluaran Pembiayaan}) \\ &= (\text{Realisasi Pendapatan} + \text{Realisasi Penerimaan Pembiayaan}) - \\ &(\text{Realisasi Belanja} + \text{Realisasi Pengeluaran Pembiayaan}) \\ &= \text{Realisasi Penerimaan Daerah} - \text{Realisasi Pengeluaran Daerah} \end{aligned}$$

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{SiLPA Tahun Tertentu} - \text{SiLPA Tahun Sebelumnya}}{\text{SiLPA Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Menurut Munir, dkk (2004:22) secara matematis merumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{Pt - Po}{Po} \times 100\%$$

Dimana:

- r** = Pertumbuhan
- Pt** = SiLPA Tahun Tertentu
- Po** = SiLPA Tahun Sebelumnya

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Amran, Darwanis, & Syukriy, 2015)	Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh)	Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Perubahan Belanja Bantuan Sosial	Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara bersama-sama dan terpisah terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
2.	(Nellyanti, Darwanis, & Syukriy, 2016)	Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Studi Pada	Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan anggaran SiLPA berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran Belanja Tidak Langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

		Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh)		
3	(Novandy, Anhulaila, & Ridwan, 2015)	Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah)	Belanja Langsung, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi	Hasil pengujian statistic menunjukkan bahwa ada pengaruh belanja langsung dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4	(Martunis, Darwanis, & Syukriy, 2014)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan Apbd Kabupaten/Kota Se-Aceh	Belanja Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja daerah. Diperoleh hubungan yang positif antara variable SiLPA dengan variable belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh.
5	(Simamora, 2014)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Prespektif Teoritis	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan, Pengeluaran Pembiayaan, Belanja Daerah	Hasil kajian menunjukkan bahwa secara teoritis sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berpengaruh terhadap total belanja daerah dimasa yang akan datang.
6	(Christian, 2013)	Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung	Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran baik, tapi penggunaan anggaran masih kurang efektif, dilihat dari Realisasi Belanja lebih kecil dari Anggaran Belanja, dan Pertumbuhan Belanja dari Pemerintah Kota Bitung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, alasan kenaikan belanja daerah biasanya dikaitkan dengan perubahan kurs Rupiah.
7	(Efendi, Agustinus, Paulus, & Allo, 2017)	Pengaruh Pendapatan Transfer Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Mamberamo Tengah	Pendapatan Transfer, SiLPA, Belanja Modal	Berdasarkan hasil estimasi pengukuran bahwa diketahui pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif.
8	(Ikhwani, 2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau	Dokumen perencanaan, Pencatatan adminisitrasi, Parsial Kompetensi SDM, SiLPA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencatatan Adminisitrasi dan Kompetensi Pegawai dapat meningkatkan SiLPA pada Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan Dokumen Perencanaan secara parsial tidak dapat meningkatkan SiLPA

				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
9	(Ahmad, 2016)	Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)	PAD, DAU, SiLPA dan realisasi anggaran belanja daerah	Penelitian ini menyimpulkan baik secara parsial maupun simultan variabel independen PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pada periode 2012 hingga 2014 telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah.
10	(Andriani & Yuliana, 2016)	Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013	Belanja Modal, PAD, dana perimbangan, SiLPA, alokasi belanja modal 32 provinsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2010-2013, belanja modal 32 Propinsi di Indonesia tergolong rendah. PAD dan DAU menjadi sumber penerimaan terbesar. DBH dan SiLPA cukup berfluktuasi selama periode penelitian. DAK cukup berkontribusi terhadap penerimaan daerah, namun tidak sebesar penerimaan daerah lainnya.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau (BPKAD). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau dimana sampel dalam penelitian ini berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Data yang terkumpul akan dievaluasi dengan menggunakan Analisis Rasio untuk mengetahui tingkat pertumbuhan SiLPA. Rasio pertumbuhan yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pertumbuhan SiLPA merupakan perbandingan antara SiLPA yang diperoleh tahun sekarang dengan SiLPA yang tahun lalu. Analisis deskriptif dengan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA yang terjadi selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu sejak 2017-2021

### IV. HASIL PENELITIAN

Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah di catat dan dikelola dalam APBD. Dalam penelitian ini data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah di catat dan dikelola dalam APBD. Dalam penelitian ini data yang

digunakan untuk menganalisis SiLPA pada APBD Pemerintah Kabupaten Berau adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2017-2021.

Tingkat realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Berau tertinggi pada tahun 2018 yakni sebesar 108,86 persen dari yang di anggarkan dan didominasi oleh item Pendapatan Transfer sebesar 109,63 persen. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 95,48 persen dari yang dianggarkan. Pendapatan Daerah mencakup:

- a) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 140,25 persen dari yang dianggarkan, yang di dominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni dengan tingkat realisasi yang dicapai sebesar 184,24 persen. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 86,11 persen dari yang di anggarkan.
- b) Pendapatan Transfer, yang terdiri dari : pembagian bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Realisasi Pendapatan Transfer tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 109,63 persen dari yang di anggarkan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari dana kontigensi atau penyeimbang, dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi lain dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, bantuan dana pasca bencana alam, dan penerimaan dari pihak ketiga. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tertinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 113,49 persen dari yang di anggarkan dan di dominasi oleh pendapatan hibah.

Tingkat Realisasi Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Berau tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 84,82 persen dari yang dianggarkan, dan didominasi oleh Belanja Modal yakni sebesar 84,60 persen dari yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 73,74 persen.

Surplus terjadi apabila realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan defisit terjadi jika realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja. Surplus tertinggi terjadi pada tahun 2018 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa lima tahun terakhir pemerintah mengalami Defisit dan terjadi kemungkinan terdapat beberapa kegiatan yang mengalami kurangnya perencanaan ataupun bencana dalam kondisi yang tidak terduga.

Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus APBD Kabupaten Berau selama periode tersebut. Tingkat Realisasi tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 100,63 persen dari yang di anggarkan dan terendah terjadi pada tahun 2018 dan 2020 yakni sebesar 100 persen. Pembiayaan Netto diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau selama tahun 2017-2021.

SiLPA terbentuk dari pejumlahan surplus/defisit yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021 mengalami SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ini diperoleh dari surplus ditambah pembiayaan netto yang terjadi pada periode tersebut. SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 805.600.325.887,07. Sedangkan SiLPA terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp.539.929.551.389,08. SiLPA diperoleh dari surplus ditambah pembiayaan netto yang terjadi pada pemerintah

Kabupaten Berau selama tahun 2017-2021. SiLPA tertinggi terjadi pada pada tahun 2019 yakni sebesar Rp.805.600.325.887,07 sedangkan SiLPA terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp.539.929.551.389,08.

Dalam Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan informasi mengenai laporan surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu (meliputi satu tahun).

Tabel 2.2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	SiLPA
2017	1.857.586.871.722,86	1.893.782.504.877,38	(36.195.633.154,52)	643.929.257.352,39	0	607.733.624.197,87
2018	2.319.719.448.128,22	2.121.999.966.989,45	197.719.481.138,77	607.733.624.197,87	0	805.453.105.336,64
2019	2.956.615.205.752,04	2.956.471.985.201,61	143.220.550,43	805.457.105.336,64	0	805.600.325.887,07
2020	2.356.039.778.496,33	2.615.487.355.357,94	(259.447.576.861,61)	805.613.742.113,83	5.900.000.000,00	540.266.165.252,22
2021	2.254.733.927.244,23	2.253.820.111.107,37	913.816.136,86	540.275.735.252,22	1.260.000.000,00	539.929.551.389,08

Sumber : BPKAD (APBD Kab. Berau) 2022

Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam bentuk penyusunan anggaran dapat terealisasi. Pada sisi pengeluaran juga akan terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan pada belanja telah dilaksanakan secara efektif. Dari hasil tersebut akan terlihat adanya sisa anggaran yang merupakan penghubung anatara APBD tahun anggaran yang lalu dengan APBD tahun anggaran yang akan datang. Realisasi Anggaran dan Belanja daerah dapat dilihat pada tabel di atas. Dari tabel 12 merupakan perkembangan mengenai SiLPA yang terjadi pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 yang menunjukkan bahwa SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Berau mengalami fluktuasi. SiLPA pada tahun 2017 sebesar Rp.607.733.624.197,87 mengalami penurunan dikarenakan adanya defisit pada tahun anggaran yang disebabkan oleh belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. SiLPA pada tahun 2018 mengalami peningkatan terjadi adanya surplus sebesar Rp.197.719.481.138,77 dikarenakan pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan belanja daerah dan tidak terjadinya pengeluaran pembiayaan sehingga SiLPA pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp.805.453.105.336,64. SiLPA pada tahun 2019 terjadinya surplus sebesar Rp.143.220.550,43.



Sumber: Data Diolah, 2022

Gambar 1. Perkembangan SiLPA Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017-2021

## V. KESIMPULAN

Menurut Data Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017-2021 Pemerintah Kabupaten Berau selalu memperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal ini timbul disebabkan oleh pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja yang dilakukan oleh tiap satuan kerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, Tingkat pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017-2021 berfluktuasi. SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan saldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal yang baik yang mampu menutupi desifit anggaran dengan memanfaatkan surplus dan SiLPA tahun sebelumnya. Kedua, Faktor-faktor penyebab timbulnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017-2021 adalah Pelampauan pendapatan daerah dan Penghematan Belanja Daerah. Cukup Efisien sebab perencanaan peningkatan pendapatan yang mampu mengalokasikan dana dengan baik sehingga terjadinya penghematan belanja. Diungkapkan secara efektif dalam pengelolaan dimana pendapatan dan belanja yang diperoleh tidak jauh berbeda dari apa yang telah dianggarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2016, Februari). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 11-25.
- Amran, Darwanis, & Syukriy, A. (2015, Februari). Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 1-10.
- Andriani, N. L., & Yuliana, L. (2016, Juli). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(3), 140-146.
- Anita, Mohammad, S., & Hamzah, A. (2014, Agustus). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(3), 21-29. Retrieved from <https://jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/viewFile/4682/4049>
- Christian, K. (2013, Juni). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 393-400.
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018, November). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(3), 445-455.
- Efendi, J., Agustinus, S., Paulus, K., & Allo, L. (2017). Pengaruh Pendapatan Transfer Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Mamberamo Tengah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(2), 1-15.
- Firmansyah, A. (2019, Juni). Bagaimana Respon Investor Terhadap Kepemilikan Saham oleh CEO? *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(1), 15-28.

- Ikhwani, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 35-60.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (p. 264). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martunis, Darwanis, & Syukriy, A. (2014, Januari). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 7(1), 52-57.
- Nellyanti, Darwanis, & Syukriy, A. (2016, 5 9). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 68-78.
- Novandy, A., Anhulaila, M. P., & Ridwan. (2015, September). Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*, 3(9), 147-158.
- Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2010).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
- Rahayu, R. P. (2016, Mei). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Makro, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 1(1), 57-81.
- Simamora, S. (2014, September). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Prespektif Teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 258-271.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (2021).